

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil kajian Efektifitas kelembagaan lembaga pengelola Hutan Nagari dalam mencapai tujuannya di hutan nagari Pakan Rabaa dan Pasir Talang Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial dari aspek ekologi sudah efektif dimana telah merubah perilaku pemegang izin yang eksploitatif menjadi peduli terhadap hutan, pemegang izin sudah berperan aktif dalam melakukan pelestarian dan perlindungan hutan yakni dengan menanam kembali tanaman hutan secara agroforestry sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan berupa terjaganya sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan kebakaran hutan, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga. Untuk angka pembalakan liar sudah dapat ditekan seminimal mungkin. Sudah terjadi penurunan angka pembalakan liar di Hutan Nagari Pakan Rabaa dan Pasir Talang Timur pasca pemberlakuan skema hutan nagari ini.
 - b. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam aspek ekonomi tidak efektif dimana program perhutanan sosial belum dapat meningkatkan jumlah produksi dihasilkan dari kegiatan usaha, jumlah keuntungan bersih dan perluasan usaha serta program ini belum membuka peluang usaha yang banyak bagi pemegang izin. Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial yang dibentuk di LPHN belum semuanya dapat berjalan dan bertransaksi serta kemampuan akses pasar pemegang izin dalam pemasaran produk Hasil Hutan Bukan Kayu juga masih rendah.
 - c. Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam aspek sosial juga tidak efektif dimana LPHN belum mampu meningkatkan wawasan keanggotaan pemegang izin, terlihat dari kurangnya partisipasi anggota LPHN dalam setiap kegiatan serta belum kuatnya kapasitas kelembagaannya. LPHN juga belum mampu memberikan kepuasan kepada pemegang izin terhadap hasil yang dicapai, belum memberikan pengaruh terhadap petani

sekelilingnya dan belum berkontribusi terhadap pembangunan nagari setempat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari
 - a. Faktor yang mempengaruhi efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari adalah faktor keberadaan dan peranan pemimpin dalam LPHN. Seberapa besar pengaruh karakter dan kepribadian ketua dalam meningkatkan kinerja anggota sangat tergantung pada seberapa besar pula ketua bisa bertindak dan berperilaku yang dapat memotivasi anggota untuk selalu meningkatkan kinerja.
 - b. Efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari juga dipengaruhi oleh fasilitasi yang dilakukan oleh pihak luar, seperti pemerintah daerah dan juga lembaga non pemerintah.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan dan peranan pemimpin memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari dalam mencapai tujuannya. Karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk memotivasi ketua LPHN agar bertindak dan berperilaku yang dapat memotivasi anggota. Berikut upaya-upaya yang dilakukan LPHN:
 - a. Ketua LPHN harus membuat rencana kerja dan merealisasikan rencana kerja yang telah dibuat
 - b. Ketua harus memberikan contoh yang baik kepada anggotanya dan menstransfer ilmu yang didapat dari berbagai pelatihan yang telah diikuti.
 - c. Dalam menjalankan kegiatana antara ketua, pengurus dan anggota harus saling support.
2. Dukungan dari pihak luar juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap efektifitas Lembaga Pengelola Hutan Nagari, kerjasama yang dijalin dengan pihak luar dalam melaksanakan kegiatan sangat menentukan keberhasilan LPHN dalam mencapai tujuan. Karena itu perlu dilakukan

upaya-upaya oleh LPHN agar bisa memperoleh bantuan dari pihak luar, berikut upaya-upaya yang dilakukan:

- a. Ketua LPHN menjalin kerjasama dengan pihak luar, seperti instansi-instansi terkait dengan program yang direncanakan. Dengan cara ini LPHN mendapatkan bantuan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.
- b. Ketua LPHN harus berperan aktif dilembaga-lembaga terkait, seperti: Pemerintah Nagari, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan BPSKL Wilayah Sumatera, karena instansi tersebut banyak menyalurkan bantuan kepada LPHN yang mengajukan proposal, dan bantuan tersebut bisa digunakan untuk pengembangan dan kemajuan LPHN.

C. Saran

1. Perlu dilakukan Pengawasan manajemen LPHN untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas kelembagaan seperti macetnya koordinasi antar pengurus maupun dengan anggota. Pemberian reward (penghargaan) bagi pengurus berprestasi dan anggota yang aktif dalam kegiatan LPHN dapat memacu persaingan sehat diantara pengurus dan anggota. Sehingga masing-masing individu yang tergabung dalam LPHN mampu memaksimalkan peran dan kemampuannya untuk berkontribusi penuh dalam memajukan lembaga yang telah memberikan kebermanfaatn bagi mereka. Secara tidak langsung loyalitas dan totalitas mereka akan terlihat jelas dalam prosesnya. Pemberian Sanksi tegas secara administrasi sebaiknya dikenakan kepada LPHN pasif, yaitu LPHN yang tidak menunjukkan tanda-tanda keaktifan sama sekali, baik pengurus maupun anggotanya.
2. Perlu dilakukan reorientasi dan pemahaman paradigma baru mengenai LPHN agar masyarakat paham bahwa setiap individu berperan penting dalam memajukan eksistensi lembaga yang berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
3. Perlu dilakukan regenerasi pengurus dan penataan kembali manajemen kelembagaan untuk mewujudkan LPHN yang kokoh dan mandiri.
4. Perlu peningkatan peranan dan keterlibatan aktif pendamping dalam

mengawasi dan melakukan pembimbingan melalui kegiatan positif dan solutif demi terwujudnya LPHN yang aktif dan produktif.

5. Perlu diterapkan secara bijaksana insentif dan disinsentif yang harus diberikan pemerintah agar program perhutanan social benar-benar dilaksanakan oleh pemegang izin. Program insentif dan disinsentif tersebut akan bermakna dan berdampak jika dituangkan dalam kebijakan pemerintah.
6. Pemerintah disarankan untuk membantu memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pemasaran HHBK, memfasilitasi kegiatan promosi dilevel provinsi dan nasional serta membantu menjaga kestabilan harga produk HHBK.

